

MANAJEMEN BIMBINGAN DAN KONSELING DI SMA NEGERI

Oleh:

K.A. Rahman, Muhamad Muspawi, Titin Martini

Universitas Jambi

(email: ka_rahman@unja.ac.id)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi manajemen bimbingan dan konseling pada SMA Negeri di Kota Jambi. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian pada empat SMA Negeri di Kota Jambi. Partisipan penelitian adalah kepala sekolah, koordinator BK dan Siswa. Objek Penelitian adalah aspek-aspek manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan SMA Negeri di Kota Jambi masih menghadapi berbagai permasalahan dan kendala dalam manajemen bimbingan dan konseling. Pada aspek perencanaan terkait dengan kondisi dan situasi sekolah yaitu mengenai kebijakan tatap muka untuk kegiatan BK, dan fasilitas serta anggaran. Sedangkan pada aspek pengorganisasian terkait dengan sosialisasi cara kerja BK, kemudian pada aspek pelaksanaan terkait layanan dan kegiatan pendukung. Selanjutnya aspek evaluasi terkait dengan kegiatan pencatatan, penetapan standar kinerja, dan realisasi perbaikan oleh petugas BK.

Kata kunci : Evaluasi Bimbingan Konseling, Pelaksanaan Bimbingan Konseling, Perencanaan Bimbingan dan Konseling, Pengorganisasian Bimbingan dan Konseling

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of guidance and counseling management at SMA Negeri in Jambi City. Using qualitative descriptive method with case study approach. The location of research at four SMA Negeri in Jambi City. Research participants are principals, guidance and counseling officer and Student. Research Objects are aspects of management including planning, organizing, implementation and evaluation. The research results show SMA Negeri in Kota Jambi still facing various problems and obstacles in management guidance and counseling. In planning aspect related to condition and situation of school that is about face-to-face policy for guidance and counseling activity, and facility and budget. While in the organizing aspect related to the socialization of the workings of guidance and counseling, then on the implementation aspects related services and supporting activities. Furthermore, the evaluation aspect relates to the recording activity, the setting of performance standards, and the realization of improvements by the guidance and counseling officer.

Key word : Counseling and Guidance Planning, Evaluation of Counseling Guidance, Implementation of Counseling Guidance, Organizing Guidance and Counseling.

PENDAHULUAN

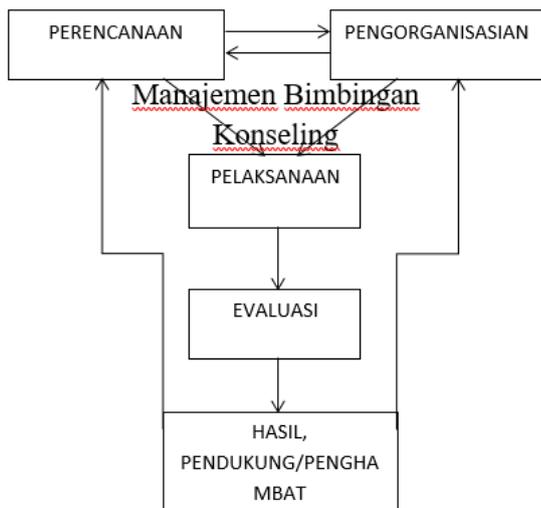
Tujuan umum dari layanan bimbingan dan konseling (BK) dalam Permendikbud No.111 Tahun 2014, yaitu membantu peserta didik agar dapat mencapai kematangan dan kemandirian dalam kehidupannya serta menjalankan tugas-tugas perkembangannya yang mencakup aspek pribadi, sosial, belajar, karir secara utuh dan optimal. Untuk mencapai tujuan bimbingan dan konseling tersebut tentu selayaknya proses manajemen bimbingan dan konseling berjalan dengan baik.

Manajemen dibutuhkan dalam kegiatan Bimbingan dan Konseling mengingat pelayanan bimbingan adalah bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan program pendidikan di sekolah, yang juga berhubungan dengan penganggaran, sehingga

dibutuhkan perencanaan yang baik agar antara program bimbingan dan konseling dan program sekolah dapat sinergi, sejalan atau tidak berbenturan satu sama lain. Disamping itu perencanaan dibutuhkan karena untuk menyesuaikan program yang dibuat dengan kebutuhan siswa.

Manajemen dalam bimbingan dan konseling sangat penting untuk mendukung tercapainya tujuan bimbingan dan konseling yang efektif dan efisien. Program bimbingan dan konseling yang efektif dan efisien membutuhkan manajerial yang baik, dan manajerial merupakan salah satu kompetensi yang wajib dimiliki oleh guru pembimbing/konselor. (Permendiknas No. 27 Tahun 2008).

Dari hasil survei di beberapa SMA Negeri Kota Jambi juga peneliti menemukan adanya keluhan-keluhan guru atau petugas BK perihal tidak adanya jam masuk kelas bagi Program Bimbingan dan Konseling, dan guru atau petugas BK yang sekolahnya memberlakukan BK masuk kelas pun merasa kurang optimal dalam melaksanakan layanan, ditambah lagi perasaan tidak nyaman pelaksana pelayanan BK saat harus mengganggu atau meminta jam pelajaran lain untuk melaksanakan layanan, sebagai konsekuensi kurangnya waktu untuk melaksanakan layanan BK.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Manajemen BK
Sumber: Diolah oleh Peneliti dari hasil penelitian

Sugiyo (2012) menyatakan manajemen bimbingan dan konseling adalah kegiatan yang diawali dari perencanaan kegiatan bimbingan dan konseling, pengorganisasian aktivitas dan semua unsur pendukung bimbingan dan konseling, menggerakkan sumber daya manusia untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling, memotivasi sumber daya manusia agar kegiatan bimbingan dan konseling mencapai tujuan serta mengevaluasi kegiatan bimbingan dan konseling untuk mengetahui apakah semua kegiatan layanan sudah dilaksanakan dan mengetahui bagaimana hasilnya.

Prayitno (2004) menyatakan pengelolaan bimbingan dan konseling berfokus pada empat kegiatan, yaitu perencanaan (planning-P), pengorganisasian (organizing-O), pelaksanaan (actuating-A), dan pengontrolan (controlling-C).

Dari berbagai pendapat diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa manajemen bimbingan dan konseling adalah kegiatan manajemen yang dilakukan untuk mencapai tujuan bimbingan dan konseling yang efektif dan efisien

dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada.

Menurut Hikmat (2009) menyatakan ada 5 prinsip dalam pengelolaan manajemen yaitu (1) prinsip efisiensi dan efektifitas, yakni dimana fungsi manajemen dilakukan dengan mempertimbangkan sarana prasarana, keadaan dan kemampuan organisasi agar relevan dengan tujuan yang dicapai, (2) prinsip pengelolaan, yakni dimana suatu manajemen dilakukan secara sistematis dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan, (3) prinsip pengutamakan tugas pengelolaan, yakni dimana seorang manajer bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan manajemen, baik pelayanan internal maupun eksternal, (4) prinsip kepemimpinan yang efektif, yakni dimana seorang manajer harus memiliki sifat yang bijaksana dalam mengambil suatu keputusan dan mampu berhubungan baik dengan semua personel di dalam organisasi tersebut, dan (5) prinsip kerjasama, yakni kerjasama didasarkan pada pengorganisasian manajemen terkait dengan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan tugas masing-masing personel.

Pada bimbingan dan konseling di sekolah fungsi-fungsi manajemen ini tergambar dalam tahapan-tahapan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengevaluasian program bimbingan dan konseling.

Hikmat (2009) menyatakan bahwa perencanaan pendidikan merupakan keseluruhan proses perkiraan dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan dalam pendidikan untuk masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan yang akan ditentukan. Sugiyo (2012) menyatakan perencanaan merupakan aktivitas atau keputusan apapun dalam organisasi untuk jangka waktu tertentu.

Menurut Santoadi (2010) kegiatan perencanaan bimbingan dan konseling meliputi (a) identifikasi kebutuhan, (b) analisis situasi, (c) merumuskan dan meninjau alternatif pemecahan masalah, dan Sukardi (2008) menyatakan dalam tahap perencanaan program perlu mempertimbangkan (a) perumusan masalah yang dihadapi siswa, konselor dan kepala sekolah, (b) perumusan tujuan yang jelas, dan (c) perumusan inventaris berbagai fasilitas yang ada, personel dan anggaran biaya.

Menurut Nurihsan (2012), aspek penting yang dilakukan dalam perencanaan yaitu, (a) analisis kebutuhan dan permasalahan siswa, (b) penentuan tujuan program, (c) analisis situasi dan kondisi sekolah, (d) penentuan jenis kegiatan, (e) penetapan metode dan teknik, (f) penetapan

personel, (g) penetapan fasilitas dan biaya, (h) perkiraan hambatan dan usaha mengatasinya. Lebih lanjut Nurihsan (2012) mengemukakan bahwa pengorganisasian program bimbingan dan konseling merupakan bentuk upaya melibatkan orang-orang ke dalam organisasi bimbingan serta upaya pembagian kerja antar anggota organisasi bimbingan dan konseling, dan Sugiyo (2012) menyatakan pengorganisasian adalah upaya mengatur tugas perseorangan atau kelompok dalam organisasi dan merancang hubungan kerja antar unit organisasi.

Menurut Sukardi (2008), konselor perlu memperhatikan beberapa hal dalam pengorganisasian, yaitu (1) semua personel sekolah harus dihimpun dalam suatu wadah sehingga terwujud dalam satu kesatuan untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling, (2) melakukan persamaan persepsi dalam melakukan layanan meliputi mekanisme kerja, pola kerja, dan prosedur kerja, dan (3) adanya perincian yang jelas tentang tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing.

Sugiyo (2012) mengungkapkan alasan pengorganisasian kegiatan bimbingan dan konseling adalah untuk (a) meningkatkan efisiensi dan efektifitas dari kegiatan bimbingan dan konseling; (b) meningkatkan pemahaman terhadap stakeholder; (c) membangun komunikasi antar personel bimbingan dan konseling; dan (d) membangun dan menetapkan akuntabilitas kegiatan bimbingan dan konseling.

Pengorganisasian merupakan kunci dari manajemen bimbingan dan konseling karena setiap kegiatan manajemen bimbingan dan konseling dari perencanaan sampai dengan pengawasan memerlukan koordinasi yang harmonis dan hubungan kerja sama yang baik antara konselor dan personel sekolah.

Sukardi (2008) menyatakan pelaksanaan adalah kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling yang terkait langsung dengan konseli

(penerima layanan). Wardati (2011) pelaksanaan program satuan kegiatan yaitu kegiatan layanan dan kegiatan pendukung merupakan ujung tombak kegiatan BK, semua kegiatan layanan memerlukan kontak langsung dengan siswa, perorangan atau klasikal.

Prayitno (2015), Aqib (2012), dan Sukardi (2010) menyebutkan layanan bimbingan dan konseling meliputi orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, bimbingan belajar, konseling perorangan, konseling kelompok, bimbingan kelompok. Dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling yang meliputi instrumentasi bimbingan dan konseling, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, dan alih tangan kasus.

Evaluasi adalah fungsi manajemen yang terakhir dalam bimbingan dan konseling yaitu kegiatan yang dikendalikan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan. Evaluasi terkait dengan bagaimana mengawasi dan mensupervisi kegiatan bimbingan dan konseling, apakah pelaksanaan bimbingan dan konseling sesuai dengan program yang telah dibuat. Usman (2014) menyatakan pengendalian adalah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah diterapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut.

Kegiatan dalam evaluasi menurut Sugiyo (2012) meliputi: (1) menetapkan standar kinerja, (2) mengukur kinerja, (3) membandingkan prestasi kerja dengan standar yang ditetapkan, dan (4) mengambil tindakan korektif saat ditemukan penyelewengan. Sedangkan Santoadi (2010) menyatakan proses evaluasi meliputi (1) recording (administrasi/ pencatatan), (2) evaluasi (pengukuran dan penilaian hasil dan proses kerja serta kinerja organisasi), dan (3) pengambilan langkah perbaikan dan pengembangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Merriam (1998) mengemukakan bahwa case atau bounded system bisa berupa seorang anak, sebuah program, atau sebuah sekolah. Dalam penelitian ini yang menjadi "case" adalah Manajemen Bimbingan dan Konseling pada empat SMA Negeri di Kota Jambi, yang dipilih karena menyediakan alokasi jam

masuk kelas bagi kegiatan bimbingan dan konseling.

Penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumen sebagai alat pengumpul data dan juga menggunakan demografik angket peserta penelitian untuk mendata latar belakang mereka. Sehubungan dengan telah ditentukannya objek penelitian, maka kisi-kisi dari penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Kisi-kisi penelitian

NO	Tema	Sub tema
1	Perencanaan Program BK	a. Analisis kebutuhan/permasalahan siswa b. Analisis kondisi dan situasi sekolah c. Penentuan tujuan d. Penentuan jenis, teknik, dan strategi layanan e. Penentuan waktu dan tempat kegiatan f. Penentuan fasilitas dan anggaran biaya
2	Pengorganisasian Program BK	a. Sosialisasi cara kerja yang dilakukan petugas bimbingan dan konseling b. Pembagian tugas antar petugas bimbingan dan konseling c. Pelibatan dan koordinasi dengan stakeholder dalam kegiatan bimbingan dan konseling d. Menciptakan hubungan kerjasama dengan stakeholder
3	Pelaksanaan Program BK	a. Layanan bimbingan dan konseling b. Kegiatan pendukung bimbingan dan konseling
4	Evaluasi Program BK	a. Pencatatan hasil kerja dan kinerja b. Menetapkan standar kinerja c. Mengukur dan menilai hasil kerja dan kinerja d. Mengambil tindakan perbaikan dan pengembangan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Temuan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen bimbingan dan konseling di SMA Negeri Kota Jambi masih menghadapi berbagai permasalahan dan kendala dalam manajemen bimbingan dan konseling terkait dengan kondisi dan situasi sekolah yaitu mengenai kebijakan tatap muka untuk kegiatan BK, fasilitas dan anggaran, sosialisasi cara kerja BK, pelaksanaan layanan, kegiatan pendukung, pencatatan, standar kinerja, dan realisasi perbaikan oleh petugas BK, dan hal ini dapat mempengaruhi kualitas layanan BK itu sendiri.

Tahap perencanaan BK di SMA Negeri Kota Jambi berjalan cukup baik, ditandai dengan adanya analisis kebutuhan siswa dan analisis kondisi sekolah, namun jika setiap sekolah memiliki ruang BK khusus tanpa bergabung dengan ruang bidang lain dan ketika tersedia penganggaran operasional kegiatan BK secara penuh serta dikelola oleh organisasi BK sendiri, tentu tahap perencanaan ini dapat dilakukan sepenuhnya dan tentunya menunjang pelaksanaan BK itu sendiri.

Tahap pengorganisasian dalam manajemen BK di SMA Negeri Kota Jambi berjalan cukup baik ditandai dengan adanya pembagian tugas antar petugas BK dan pelibatan stakeholder, hanya saja mengingat betapa besarnya pengaruh sosialisasi tentang BK terhadap penerimaan stakeholder, jika sosialisasi diagendakan secara rutin dan komunikasi dengan

stakeholder terpelihara dengan baik tentu pengorganisasian BK menjadi lebih maksimal.

Kegiatan sosialisasi dalam pengorganisasian tidak berjalan sebagaimana mestinya, dimana dari empat sekolah yang diteliti hanya satu sekolah saja yang melakukan secara rutin sosialisasi yakni pada rapat awal tahun ajaran. Menandakan bahwa Tim BK di tiga sekolah lainnya menganggap warga di sekolah telah memahami keberadaan BK dan cara kerjanya sehingga sosialisasi dipandang tidak begitu diperlukan. Padahal sosialisasi semestinya rutin dilakukan terhadap warga sekolah, mengingat selalu ada warga sekolah yang baru setiap tahunnya dan juga untuk mendapatkan umpan balik berupa masukan-masukan di saat sosialisasi berlangsung.

Pelaksanaan bimbingan dan konseling dalam penelitian ini ditemukan tidak berjalan sepenuhnya sebagaimana perencanaan program yang dibuat. Pelaksanaan merupakan inti dari manajemen bimbingan dan konseling, karena inilah tahap dimana seorang petugas bimbingan dan konseling akan menunjukkan action terhadap sasaran mereka, akan menerapkan berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa sebagai sasaran kegiatan bimbingan dan konseling. Ini sesuai dengan Wardati (2011) pelaksanaan program satuan kegiatan yaitu kegiatan layanan dan kegiatan pendukung merupakan ujung tombak kegiatan BK, semua kegiatan layanan memerlukan kontak

langsung dengan siswa, perorangan atau klasikal, juga pendapat Sukardi (2008) menyatakan pelaksanaan adalah kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling yang terkait langsung dengan konseli(penerima layanan).

Untuk layanan klasikal, layanan klasikal hanya diberikan apabila ada hal yang mendesak yang perlu disampaikan atau saat ada jam kosong, artinya layanan klasikal diberikan secara spontan, padahal pelayanan yang spontan sangat rawan akan resiko seperti yang diungkapkan Santoadi (2010), bahwa kelemahan pelayanan spontan tanpa perencanaan kualitasnya kurang dapat dipertanggungjawabkan dan jangkauan pelayanan bimbingan dan konseling sempit dan evaluasi keberhasilan program bimbingan dan konseling sukar dilakukan.

Keterbatasan waktu yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan layanan dan kurang dekatnya Petugas BK dengan siswa yang menyebabkan kurang luasnya siswa untuk mengkomunikasikan masalahnya dengan petugas BK, ini menandakan bahwa BK membutuhkan waktu yang lebih dari satu jam untuk tatap muka dengan siswa, dan mengacu pada Permendikbud No. 111 Tahun 2014, pasal 6 butir 4, maka waktu tatap muka petugas BK dengan siswa di kelas adalah dua jam.

Proses pelaksanaan program BK di SMA Negeri Kota Jambi berjalan kurang optimal, disamping tidak sepenuhnya sesuai dengan perencanaan seperti kesulitan melaksanakan layanan tertentu, juga karena masih adanya sekolah yang tidak merata memberlakukan jam BK masuk kelas, meskipun ada jadwal khusus tapi tidak dimanfaatkan optimal oleh petugas BK, ditambah lagi adanya intervensi kepada BK dari pihak tertentu, dan juga keterkaitan dengan anggaran, khususnya untuk kegiatan pendukung yang membutuhkan biaya.

Kegiatan evaluasi bimbingan dan konseling pada beberapa SMA Negeri di Kota Jambi dimulai dari pencatatan hasil kerja dan kinerja, menurut data hasil wawancara dengan Koordinator BK, diketahui setiap selesai pemberian layanan masih ada petugas BK yang tidak rutin melakukan pencatatan. Ada yang hanya membuat jurnal saja dan tidak membuat laporan pelaksanaan program (Lapelprog).

Penilaian hasil kerja dilakukan pihak sekolah dan pihak luar sekolah, petugas yang melakukan penilaian dari dalam disebut auditor yang bertugas menilai semua pelaksanaan manajemen di sekolah yang anggotanya terdiri dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah dan

beberapa guru yang ditunjuk. Sedangkan penilaian dari pihak luar sekolah dilakukan oleh pengawas BK dari dinas pendidikan. Penilaian meliputi Program BK, pencatatan, dan pelaporan pelaksanaan program BK dan sebagainya.

Dilihat dari tahapan-tahapan manajemen BK pada beberapa SMA negeri di Kota Jambi, masih memerlukan banyak perbaikan mulai dari (1)perencanaan yang menyangkut kondisi dan situasi sekolah, fasilitas dan anggaran, (2) Pengorganisasian terkait sosialisasi cara kerja BK termasuk didalamnya tugas dan fungsi BK, (3) Pelaksanaan yaitu layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling, serta (4) Evaluasi terkait pencatatan hasil kerja dan kinerja, penetapan standar kinerja dan kegiatan mengukur dan menilai hasil kerja dan kinerja BK.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa SMA Negeri di Kota Jambi sudah melaksanakan tahapan manajemen dalam bimbingan dan konseling dan sudah berupaya memberikan layanan terbaik bagi siswa sesuai dengan kondisi dan situasi sekolah, kompetensi yang dimiliki petugas BK, dukungan dan kerjasama stakeholder, tetapi beberapa SMA Negeri di Kota Jambi belum bisa menunjukkan hasil yang sesuai dengan tujuan manajemen bimbingan dan konseling yaitu BK yang produktif, berkualitas, efektif dan efisien.

Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah dan Koordinator BK di SMA Negeri Kota Jambi memperlihatkan bahwa faktor pendukung kegiatan bimbingan dan konseling pada beberapa SMA Negeri di Kota Jambi adalah tersedianya ruang BK yang telah dimiliki setiap sekolah yang memberikan kemudahan bagi siswa untuk melakukan konseling, tersedianya angket yang dibutuhkan kegiatan BK, adanya pelibatan stakeholder dalam kegiatan BK, dukungan sekolah pada organisasi BK dalam hal pengembangan BK melalui pelatihan dan seminar, tim BK yang kompak, petugas BK yang berlatar S1 Bimbingan dan Konseling.

Adapun faktor penghambat kegiatan bimbingan dan konseling pada beberapa SMA Negeri di Kota Jambi adalah kurangnya motivasi petugas BK dalam mengaplikasikan ilmunya, kurangnya sosialisasi dan komunikasi mengenai fungsi dan cara kerja BK kepada rekan sejawat, siswa dan orang tua, alokasi jam BK masuk kelas yang tidak merata, tidak optimalnya kegiatan BK pada jadwal khusus, persepsi yang keliru terhadap BK oleh siswa, guru lain, dan orang tua, jam masuk kelas yang kurang dan tidak merata di setiap kelas, intervensi terhadap BK, anggaran biaya.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pertama tahap perencanaan program bimbingan dan konseling di SMA Negeri Kota Jambi berjalan cukup baik yang ditunjukkan dengan adanya program BK yang menjelaskan adanya kegiatan analisis kebutuhan siswa, analisis situasi dan kondisi sekolah, penetapan tujuan, jenis layanan, waktu kegiatan, dan penyediaan angket yang dibutuhkan, hanya saja fasilitas ruang BK belum semuanya memenuhi standar yang dianjurkan, bahkan masih ada ruangan bergabung dengan ruang UKS, kemudian juga pengelolaan anggaran belum dilakukakan oleh organisasi BK sendiri, namun hal ini tidak menghalangi pelaksanaan kegiatan BK. Disarankan personel sekolah meliputi guru mata pelajaran, walikelas, wakil kepala sekolah hendaknya proaktif dalam pelibatan perencanaan program bimbingan dan konseling, orang tua siswa hendaknya juga dilibatkan memberikan masukan dalam perencanaan program bimbingan dan konseling, petugas BK atau konselor hendaknya merencanakan program yang seimbang antara 4 bidang bimbingan, dan merata ke semua tingkatan kelas, Kepala Sekolah hendaknya memberikan kesempatan kepada organisasi BK untuk mengelola anggaran sendiri, Kepala Sekolah hendaknya mengkondisikan jadwal masuk kelas yang merata bagi kegiatan BK. Disarankan petugas BK atau Konselor hendaknya melakukan sosialisasi mengenai kinerja dan program BK secara rutin dan menyeluruh ke semua pihak, manajemen sekolah hendaknya membantu mensosialisasikan tugas dan fungsi BK di sekolah, Dinas Pendidikan perlu menggiatkan sosialisasi undang-undang bimbingan dan konseling kepetugas BK melalui ABKIN, agar petugas BK faham betul dengan hak dan kewajibannya secara ideal, professional dan proporsional, petugas BK atau Konselor hendaknya memelihara komunikasi dengan stake holder dalam segala situasi dan kondisi.

Kedua pengorganisasian manajemen program BK di SMA Negeri Kota Jambi dari berjalan cukup baik, terlihat dari adanya pembagian tugas dan pelibatan stakeholder dalam kegiatan BK, meskipun untuk kegiatan sosialisasi tidak dilakukan secara rutin atau diagenda-kan, serta hubungan dengan stakeholder yang kurang terpelihara, karena komunikasi terjalin saat ada penanganan masalah saja. Disarankan petugas BK atau Konselor hendaknya melakukan sosialisasi mengenai kinerja dan program BK secara rutin dan menyeluruh ke semua pihak, manajemen sekolah hendaknya membantu mensosialisasikan tugas dan fungsi BK di sekolah, Dinas Pendidikan perlu

menggiatkan sosialisasi undang-undang bimbingan dan konseling kepetugas BK melalui ABKIN, agar petugas BK faham betul dengan hak dan kewajibannya secara ideal, professional dan proporsional, petugas BK atau Konselor hendaknya memelihara komunikasi dengan stake holder dalam segala situasi dan kondisi.

Ketiga, pelaksanaan program bimbingan dan konseling di SMA Negeri Kota Jambi dapat disimpulkan berjalan kurang baik, karena tidak sesuai dengan perencanaan seperti kesulitan melaksanakan layanan dan kegiatan pendukung tertentu, juga karena masih adanya sekolah yang tidak merata memberlakukan jam BK masuk kelas, meskipun ada jadwal khusus tapi tidak dimanfaatkan optimal oleh petugas BK, ditambah lagi adanya intervensi kepada BK dari pihak tertentu. Disarankan petugas BK hendaknya memotivasi diri dalam menggaplikasikan keilmuannya sebagai upaya pengembangan kegiatan BK, Kepala Sekolah hendaknya memberikan ketegasan pada petugas BK mengenai pemanfaatan jadwal khusus BK yang telah diberikan., petugas BK atau Konselor hendaknya mengoptimalkan jadwal khusus yang telah diberikan.

Keempat, evaluasi program bimbingan dan konseling di SMA Negeri Kota Jambi dapat disimpulkan berjalan kurang optimal, yang ditandai dengan belum dilakukan pencatatan yang baik oleh petugas BK, melakukan pencatatan hanya untuk laporan yang dianggap penting dan mendesak saja, tidak ada penetapan standar kinerja yang seharusnya standar kinerja disesuaikan dengan kompetensi konselor, dan masih ada Koordinator BK yang tidak melakukan penilaian terhadap anggotanya, serta kurang sigapnya Koordinator BK dalam pengambilan tindakan perbaikan kegiatan BK, meski pendukung penuh diberikan pihak sekolah untuk kegiatan pengembangan namun ini pun kembali pada petugas BK itu sendiri untuk mengaplikasikan segala ilmu yang didapat dari pelatihan dan seminar BK. Disarankan petugas BK atau Konselor hendaknya melakukan pencatatan keseluruhan kerja dan kinerjanya, Kepala Sekolah hendaknya menjadwalkan secara rutin rapat evaluasi dengan BK., Auditor hendaknya membuat standar penilaian kinerja BK, Koordinator BK hendaknya melakukan penilaian kinerja anggota timnya, Kepala Sekolah hendaknya meminimalisir segala bentuk intervensi negative terhadap kinerja BK.,petugas BK hendaknya meningkatkan wawasan dan pengetahuannya tidak hanya menunggu pelatihan

atau seminar yang diselenggarakan ABKIN atau pemerintah saja, dapat mengembangkan kualitas diri dengan belajar secara mandiri menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, Pemerintah hendaknya memperhatikan dan memprioritaskan kebutuhan tenaga konseling di sekolah serta dapat memberikan reward bagi guru BK yang berprestasi secara terus menerus sehingga guru BK dapat termotivasi menghasilkan karya terbaik dan kualitas kerja yang optimal, Pemerintah hendaknya merekrut guru BK untuk memasuki PPK dalam jabatan/ mengkonselorkan guru BK secara gratis, se-bagai langkah antisipasi kegagalan dalam melaksanakan KTSP oleh guru BK, lembaga pence-tak tenaga guru BK hendaknya lebih selektif merekrut calon pendidik khususnya guru BK agar profesionalitas dapat terwujud.

Kelima, faktor pendukung implementasi program bimbingan dan konseling di SMA Negeri

Kota Jambi adalah 1) tersedianya fasilitas fisik yaitu ruang BK; 2) tersedianya angket yang dibutuhkan; 3) adanya keterlibatan stake holder dalam kegiatan BK; 4) dukungan pelatihan dan seminar bagi petugas BK; 5) tim BK yang kompak; 6) petugas BK yang berlatar S1 BK., sedangkan faktor penghambat manajemen bimbingan dan konseling di SMA Negeri Kota Jambi adalah 1) kurangnya motivasi petugas BK dalam mengaplikasikan ilmunya; 2) kurangnya sosialisasi dan komunikasi mengenai fungsi dan cara kerja BK kepada rekan se-jawat, siswa dan orang tua; 3) tidak optimalnya kegiatan BK pada jadwal khusus; 4) persepsi yang keliru terhadap BK oleh siswa, guru lain, dan orang tua; 5) jam masuk kelas yang kurang dan tidak merata di setiap kelas; 6) intervensi negative terhadap BK; 7) anggaran biaya; 8) Kurangnya intervensi pembinaan oleh Koordinator BK

DAFTAR PUSTAKA

- Aqib, Z. (2012). *Ikhtisar Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Bandung: Yrama Widya
- Cresswell, J.W. (2007). *Qualitative inquiry and research design: choosing among five traditions*. (2nd ed) Thousand Oaks, CA: Sage Publication, Inc.
- Hikmat. (2009). *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Merriam, S.B. (1998). *Qualitative research and case study application in education*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Miles, M.B & Huberman, A.M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An expanded Sourcebook*. San Fransisco, Ca: Jossey-Bass.
- Nurihsan, A. J. (2012). *Strategi Layanan Bimbingan dan Konseling*. Bandung: Refika Aditama
- Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014. *Bimbingan dan Konseling Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*. Jakarta: Kemdikbud.
- Prayitno & Erman. A. (2015). *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rusman. (2012). *Manajemen Kurikulum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoadi, F. (2010). *Manajemen Bimbingan dan Konseling Komprehensif*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Sugiyono. (2012). *Manajemen Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Semarang: Widya Karya.
- Sukardi, D.K. (2010). *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sukardi, D.K & Desak P.E N.K. (2008). *Proses Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Usman, H. (2014). *Manajemen: Teori, Praktik dan Riset Pendidikan (Edisi 4)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wardati & Mohammad. J. (2011). *Implementasi Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.